



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 220 /KEP/HK/2021**

TENTANG


TIM TEKNIS PERCEPATAN PENURUNAN PREVALENSI *STUNTING*,  
ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA KEMATIAN BAYI  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2020 – 2023

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang**

- a. bahwa Prevalensi *Stunting*, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan permasalahan serius di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sudah menjadi target indikator makro pembangunan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dan *Sustainable Development Goals*;
- b. bahwa untuk mempercepat penurunan Prevalensi *Stunting*, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan dukungan kerja sama lintas sektor, lintas organisasi dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting*, Angka Kematian Ibu Dan Angka Kematian Bayi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2023;


**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Teknis Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting*, Angka Kematian Ibu Dan Angka Kematian Bayi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2023.
- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- memfasilitasi pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut atas kebijakan dan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran percepatan penurunan Prevalensi *Stunting*, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi NTT;
  - memfasilitasi dukungan teknis bagi peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi NTT;
  - mengordinir pelibatan kelembagaan non pemerintah untuk mendukung percepatan penurunan Prevalensi *Stunting*, AKI dan AKB di Provinsi NTT;
  - melakukan advokasi hasil rekomendasi Audit Maternal Perinatal (AMP) pada Kabupaten/Kota; dan
  - memfasilitasi proses legalisasi jaringan rujukan antar Kabupaten/Kota dan memastikan kebijakan jaringan rujukan tersebut dapat dilaksanakan.
- KETIGA** : Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kerja dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. 


- KETUJUH** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 285/KEP/HK/2019 tentang Tim Teknis Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 2 Juni 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat. 

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 220 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 2 Juni 2021**SUSUNAN TIM TEKNIS PERCEPATAN PENURUNAN PREVALENSI *STUNTING*,  
ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA KEMATIAN BAYI  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2020 – 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>	<b>OUTPUT</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan secara umum terkait pelaksanaan tugas kelompok kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> , AKI, AKB di Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Terwujudnya Pembinaan secara umum terkait pelaksanaan tugas kelompok kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> , AKI, AKB di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina		
3.	Kapolda Nusa Tenggara Timur	Pembina		
4.	Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang	Pembina		
5.	Ketua MUI Provinsi NTT	Pembina		
6.	Ketua GMIT Kupang	Pembina		
7.	Uskup Agung Kupang	Pembina		

26

8	Ketua PHDI Provinsi NTT	Pembina		
9	Ketua WALUBI Provinsi NTT	Pembina		
10	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait teknis dan operasional pelaksanaan tugas kelompok kerja Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> , AKI, AKB di Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Terlaksananya arahan secara umum terkait teknis dan operasional pelaksanaan tugas kelompok kerja Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> , AKI, AKB di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<p>a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kelompok kerja Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i>, AKI, AKB di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</p> <p>b. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan kepada kelompok kerja terkait Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i>, AKI, AKB di Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>	<p>a. Terkoordinasinya pelaksanaan tugas-tugas kelompok kerja Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i>, AKI, AKB di Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>b. Adanya Petunjuk Teknis pelaksanaan kepada kelompok kerja terkait Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i>, AKI, AKB di Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>

12.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	a. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas membantu ketua melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> , AKI, AKB;	a. Terlaksananya tugas-tugas dalam kapasitas membantu ketua melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> , AKI, AKB;
13.	Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua II	b. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> , AKI, AKB; dan c. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana diminta oleh Ketua.	b. Terawasi dan terkendalinya pelaksanaan prosedur kerja Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> , AKI, AKB; c. Terlaksananya tugas-tugas tertentu sebagaimana diminta oleh Ketua.
14.	Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas membantu ketua memastikan perencanaan dan evaluasi teknis dari masing-masing bidang.	Terlaksananya tugas-tugas dalam kapasitas membantu ketua memastikan perencanaan dan evaluasi teknis dari masing-masing bidang.
15.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota		
16.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota		
17.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota		
18.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota		
19.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota		

24

20.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas membantu ketua memastikan perencanaan dan evaluasi teknis dari masing-masing bidang.	Terlaksananya tugas-tugas dalam kapasitas membantu ketua memastikan perencanaan dan evaluasi teknis dari masing-masing bidang.
21.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota		
22.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota		
23.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		
24.	DR. David B. W. Pandie, MS/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 bidang keahlian Pemerintahan dan Organisasi	Anggota		
25.	dr. Stefanus Bria Seran, MPH/Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 bidang keahlian Penanganan Kesehatan	Anggota		

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

ny

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 220 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 2 Juni 2021

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PENURUNAN PREVALENSI *STUNTING*,  
ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA KEMATIAN BAYI  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2020 – 2023

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM POKJA</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>	<b>OUTPUT</b>
1.	Ir. Sarah Lery Mboeik/LSM PIAR	Ketua	a. memberikan masukan rumusan kebijakan terkait dengan <i>stunting</i> , kesehatan ibu dan bayi; dan b. melakukan sosialisasi advokasi terkait <i>stunting</i> , kesehatan ibu dan bayi.	a. adanya masukan rumusan kebijakan terkait dengan <i>stunting</i> , kesehatan ibu dan bayi; dan b. adanya sosialisasi advokasi terkait <i>stunting</i> , kesehatan ibu dan bayi.
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Wakil Ketua 1		
3.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Wakil Ketua 2		
4.	dr.Yustina Yudha Nita/LSM MOMENTUM USAID	Sekretaris 1	Mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta bertanggung jawab dalam penyusunan laporan tahunan.	Adanya dukungan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta bertanggung jawab dalam penyusunan laporan tahunan.
5.	Silvia J. Fanggidae, S.Sos, MEM.Dev/LSM PIKUL	Sekretaris 2		
6.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Pengelola Anggaran	Memberikan dukungan anggaran untuk mendukung penurunan Prevalensi <i>stunting</i> , AKI dan AKB.	Adanya dukungan anggaran untuk mendukung penurunan Prevalensi <i>stunting</i> , AKI dan AKB.

ny

6.	Dr. Intje Picauly, M.Si/ Universitas Nusa Cendana	Praktisi Gizi	Memberikan masukan rumusan kebijakan terkait dengan Pencegahan dan Penanganan <i>Stunting</i> .	Adanya masukan rumusan kebijakan terkait dengan Pencegahan dan Penanganan <i>Stunting</i> .
7.	Dr. Ina Debora Latu Ludji/Poltekes Kupang	Praktisi Kesehatan Ibu dan Bayi	Memberikan masukan rumusan kebijakan terkait dengan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir.	Adanya masukan rumusan kebijakan terkait dengan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir.
8.	Norman Riwukaho/ Universitas Nusa Cendana	Ahli Database	Memberikan bantuan teknis untuk pengembangan data base.	Adanya bantuan teknis untuk pengembangan data base.
9.	Matheos Viktor Messakh/ Universitas Nusa Cendana	Ahli Database dan Publikasi		
10.	Ronald Raya, SKM / Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Pengelola Data Kesehatan ibu dan Anak	Memberikan bantuan teknis untuk pengelolaan data Kesehatan Ibu dan Anak.	Adanya bantuan teknis untuk pengelolaan data Kesehatan Ibu dan Anak.
11.	Raymundus V Umbu, SKM / Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Pengelola Data Gizi	Memberikan bantuan teknis untuk pengelolaan data Gizi.	Adanya bantuan teknis untuk pengelolaan data Gizi.
<b>a. Bidang Penurunan AKI dan AKB</b>				
1.	Kepala Seksi Kesga, Gizi dan KB pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Koordinator	Mengoordinir seluruh kegiatan terkait penurunan AKI dan AKB.	Terkoordinasinya seluruh kegiatan terkait penurunan AKI dan AKB.
2.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan untuk peningkatan system rujukan dalam rangka penurunan AKI dan AKB.	Tersedianya masukan untuk peningkatan system rujukan dalam rangka penurunan AKI dan AKB.
3.	Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Mendukung perencanaan dan penganggaran untuk penurunan AKI dan AKB.	Tersedianya dukungan perencanaan dan penganggaran untuk penurunan AKI dan AKB.

4.	Koordinator Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pada Perwakilan BKKBN Provinsi NTT	Anggota	Mendukung dan memberikan masukan terkait pembinaan keluarga Balita	Tersedianya dukungan dan memberikan masukan terkait pembinaan keluarga Balita
5.	Kepala Bidang KPPM pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terhadap penyusunan strategi Pemberdayaan dan penggerakan Masyarakat untuk penurunan AKI dan AKB	Tersedianya masukan terhadap penyusunan strategi Pemberdayaan dan penggerakan Masyarakat untuk penurunan AKI dan AKB
6.	Kepala Bidang Kelembagaan Gender dan Kemitraan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terhadap penyusunan strategi Pemberdayaan dan penggerakan Masyarakat untuk penurunan AKI dan AKB	Tersedianya masukan terhadap penyusunan strategi Pemberdayaan dan penggerakan Masyarakat untuk penurunan AKI dan AKB
7.	Ketua Pokja IV pada TP PKK Provinsi NTT Periode 2018-2023	Anggota	Memberikan masukan terhadap penyusunan strategi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga	Tersedianya masukan terhadap penyusunan strategi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
8.	Dekan Fakultas Kesehatan UNDANA Kupang	Anggota	Memberikan bantuan teknis terkait dengan penurunan AKI dan AKB	Tersedianya bantuan teknis terkait dengan penurunan AKI dan AKB
9.	Ketua POGI NTT	Anggota	Memberikan bantuan teknis klinis untuk pelayanan kesehatan ibu	Tersedianya bantuan teknis klinis untuk pelayanan kesehatan ibu
10.	Ketua IDAI NTT	Anggota	Memberikan bantuan teknis klinis untuk pelayanan kesehatan bayi dan anak	Tersedianya bantuan teknis klinis untuk pelayanan kesehatan bayi dan anak
11.	Ketua IBI NTT	Anggota	Memberikan bantuan teknis klinis untuk pelayanan kesehatan ibu	Tersedianya bantuan teknis klinis untuk pelayanan kesehatan ibu
12.	Pimpinan MOMENTUM Perwakilan Kupang	Anggota	Memberikan bantuan teknis terkait dengan penurunan AKI dan AKB	Tersedianya bantuan teknis terkait dengan penurunan AKI dan AKB
13.	Pimpinan UNICEF Perwakilan Kupang	Anggota	Memberikan bantuan teknis terkait dengan penurunan AKI dan AKB	Tersedianya bantuan teknis terkait dengan penurunan AKI dan AKB
14.	Pimpinan Save The Children Perwakilan Kupang	Anggota	Memberikan bantuan teknis terkait dengan penurunan AKI dan AKB	Tersedianya bantuan teknis terkait dengan penurunan AKI dan AKB

<b>b. Bidang Percepatan Penurunan Stunting</b>				
1.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Koordinator	Mengoordinir seluruh kegiatan terkait dengan percepatan dan penurunan <i>stunting</i>	Terkoordinasinya seluruh kegiatan terkait dengan percepatan dan penurunan <i>stunting</i>
2.	Kepala Seksi Kesga, Gizi dan KB pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Koordinator	Memberikan masukan tentang kesehatan ibu dan bayi yang mendukung percepatan penurunan dan penanganan <i>stunting</i>	Tersedianya masukan tentang kesehatan ibu dan bayi yang mendukung percepatan penurunan dan penanganan <i>stunting</i>
3.	Kepala Bidang KPPM pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terhadap penyusunan strategi Pemberdayaan dan penggerakan Masyarakat untuk percepatan penurunan <i>stunting</i>	Tersedianya masukan terhadap penyusunan strategi Pemberdayaan dan penggerakan Masyarakat untuk percepatan penurunan <i>stunting</i>
4.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dan bantuan teknis terkait jaminan dan dukungan sosial ke masyarakat untuk percepatan penurunan <i>stunting</i>	Tersedianya dukungan dan bantuan teknis terkait jaminan dan dukungan sosial ke masyarakat untuk percepatan penurunan <i>stunting</i>
5.	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan terhadap penyusunan strategi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka percepatan penurunan <i>stunting</i>	Tersedianya masukan terhadap penyusunan strategi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka pencegahan dan penanganan <i>stunting</i>
6.	Kabid. Cipta Karya pada Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan untuk memastikan ketersediaan air bersih dan sarana sanitasi	Tersedianya dukungan untuk memastikan ketersediaan air bersih dan sarana sanitasi
7.	Kabid. Infrastruktur Jaringan dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan untuk penyebaran informasi terkait pencegahan dan penanganan <i>stunting</i>	Tersedianya dukungan untuk penyebaran informasi terkait pencegahan dan penanganan <i>stunting</i>

8.	Kabid. Dukcapil pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan untuk memastikan keluarga 1000 HPK memiliki dokumen kependudukan	Tersedianya dukungan untuk memastikan keluarga 1000 HPK memiliki dokumen kependudukan
9.	Ketua Pokja IV pada TP PKK Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan untuk kesejahteraan keluarga	Tersedianya dukungan untuk kesejahteraan keluarga
10.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan terkait dengan ketahanan pangan dan pertanian	Tersedianya dukungan terkait dengan ketahanan pangan dan pertanian
11.	Kepala Bidang Budidaya dan Ruang Laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan terkait dengan perikanan	Tersedianya dukungan terkait dengan perikanan
12.	Sub Koordinator Bina Keluarga Balita, Anak dan Ketahanan Keluarga Lansia pada Perwakilan BKKBN Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dan masukan untuk pembinaan keluarga balita	Tersedianya dukungan dan masukan untuk pembinaan keluarga balita.
13.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dan masukan terkait bantuan sosial untuk penurunan <i>Stunting</i>	Tersedianya dukungan dan masukan terkait dukungan bantuan sosial untuk penurunan <i>stunting</i>
14.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Politik pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dan masukan terhadap strategi Pemberdayaan dan penggerakan Masyarakat untuk penurunan <i>Stunting</i>	Tersedianya dukungan dan masukan terhadap strategi Pemberdayaan dan penggerakan Masyarakat untuk penurunan <i>Stunting</i>
15.	Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dan masukan untuk pengembangan ketersediaan peternakan untuk ketahanan keluarga 1000 HPK	Tersedianya dukungan dan masukan untuk pengembangan ketersediaan peternakan untuk ketahanan keluarga 1000 HPK

16.	Dekan FKM UNDANA	Anggota	Mendukung pelaksanaan kajian kesehatan masyarakat terkait dengan <i>stunting</i> di NTT	Tersedianya dukungan pelaksanaan kajian kesehatan masyarakat terkait dengan <i>stunting</i> di NTT
17.	Pimpinan UNICEF Perwakilan Kupang	Anggota	Memberikan bantuan teknis untuk percepatan penurunan <i>stunting</i>	Tersedianya bantuan teknis untuk percepatan penurunan <i>stunting</i>
<b>c. Sekretariat</b>				
1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinir pelaksanaan administrasi kelompok kerja Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i>, AKId dan AKB;</li> <li>b. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam hal mendukung Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i>, AKI, AKB; dan</li> <li>c. menyusun laporan pelaksanaan kelompok kerja Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i>, AKI, AKB.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terkoordinirnya pelaksanaan administrasi satuan tugas Penanganan kelompok kerja Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i>, AKI dan AKB;</li> <li>b. Terlaksananya koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam hal mendukung Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i>, AKI dan AKB; dan</li> <li>c. Tersusunnya laporan pelaksanaan kelompok kerja Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i>, AKI dan AKB.</li> </ul>

u

2.	Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Sekretaris	<p>a. Menyelenggarakan pengurusan surat menyurat kelompok kerja Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i>, AKI dan AKB;</p> <p>b. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas membantu koordinator untuk memperlancar proses koordinasi dan pelaporan.</p>	<p>a. Terselenggaranya pelaksanaan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan kelompok kerja Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i>, AKI dan AKB;</p> <p>b. Terlaksananya tugas-tugas dalam kapasitas membantu koordinator memperlancar proses koordinasi dan pelaporan.</p>
3.	Vince Bimas Panggula, SKM/Fungsional Perencana Madya pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. Menyelenggarakan pengurusan surat menyurat kelompok kerja Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i>, AKI dan AKB;</p>	<p>a. Terselenggaranya pelaksanaan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan kelompok kerja Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i>, AKI dan AKB;</p>
4.	Scherly Hayer, S.Gz/Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	<p>b. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas membantu koordinator untuk memperlancar proses koordinasi dan pelaporan.</p>	<p>b. Terlaksananya tugas-tugas dalam kapasitas membantu koordinator memperlancar proses koordinasi dan pelaporan.</p>

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

8 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT



ny